

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan perilaku demokratis siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku demokratis siswa. Dalam pelaksanaannya, hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang guru. Ia dituntut memiliki keyakinan, pemikiran, prinsip, dan konsepsi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru dalam proses pembelajaran belum menunjukkan arah yang jelas adanya karakteristik keilmuan yang dikembangkan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Guru lebih berorientasi pada pemahaman anak terhadap materi pelajaran tanpa mempertimbangkan pembentukan karakter anak sebagai efek hasil belajar, sehingga kurang mendorong terjadinya pengembangan anak yang dinamis dan berperilaku demokratis. Kemampuan berperilaku demokratis memiliki konteks bebas, proses terbuka, dan dengan susunan teratur, sehingga memungkinkan siswa menyimak informasi dengan mudah dipahami. Menurut Wantoro (2008:220) bahwa :

Selama ini di Sekolah Menengah Atas sudah dilaksanakan pendidikan demokrasi melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ataupun mata pelajaran sebelumnya, PPKn, PMP, ataupun *Civics*, terlihat adanya perilaku demokratis yang ditunjukkan siswa di sekolah (di dalam kelas, di luar kelas atau lingkungan sekolah). Perilaku yang tampak di dalam kelas diantaranya ketika sedang proses belajar mengajar berlangsung terutama dalam diskusi siswa terlihat berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat teman-teman dan mau mendengarkan temannya yang sedang mengemukakan

pendapatnya. Sedangkan perilaku demokratis siswa yang tampak di luar kelas atau lingkungan sekolah diantaranya bebas berpendapat dalam rapat OSIS, bebas memilih dan dipilih menjadi pengurus OSIS, adanya kerja sama antar individu atau kelompok dalam menyelesaikan masalah, adanya kepercayaan kepada guru, kepala sekolah dan staf petugas sekolah.

Selaras dengan hal tersebut, maka pendidikan dalam hal ini dituntut untuk menciptakan manusia yang disiplin, produktif, dan berperilaku demokratis. Oleh sebab kita membutuhkan manusia yang berperilaku demokratis, kritis dan bukan pintar menghafal, bukan manusia yang hapal sejarah, melainkan mengetahui sejarah itu untuk dijadikan landasan dalam menganalisis sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khususnya:

- a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan sebagai berikut. “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Jika kita kaji, maka dalam undang-undang tersebut tersurat bahwasannya disamping membekali generasi bangsa yang kritis, pendidikan juga berkewajiban untuk membentuk warga negara yang berperilaku demokratis. Namun, kenyataannya di lapangan berlawanan dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini nampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis seolah memberikan bukti bahwa iklim demokrasi belum tercipta secara penuh di negara kita.

Gerakan reformasi yang pada awalnya bertujuan menata kembali penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, seakan telah disalahartikan sehingga makna gerakannya tidak sesuai lagi dengan makna reformasi itu sendiri (kebablasan). Ini terlihat dari maraknya gerakan masyarakat yang semakin brutal dalam menuntut hak-haknya berupa perusakan fasilitas umum, penjarahan dan penyanderaan. Cara-cara ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai budaya etika demokrasi yang mensyaratkan kedamaian. Seperti diungkapkan Mudji (2000:45) bahwa :

Iklm budaya demokratis ditandai dengan adanya para warga yang hidup berdampingan secara damai, kreatif dan dapat menjalankan hak kontrol terhadap negaranya. Sehingga pembenahan tujuan reformasi harus segera dilakukan. Salah satu agenda reformasi yang akan dibangun bangsa Indonesia adalah menentang segala bentuk penyimpangan demokrasi seperti kediktatoran baik bersifat langsung maupun tidak langsung, *feodalisme* maupun *totaliterisme* sehingga tercipta suatu tatanan demokrasi yang sehat dan kuat.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini disamping disebabkan oleh kurang dipahaminya konsep demokrasi juga diakibatkan berakarnya budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semasa Orde Lama dan Orde Baru. Dalam hal ini pula yang menjadi faktor pendorong bergulirnya reformasi yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu, target reformasi dalam hal ini adalah melakukan suatu perubahan atas dasar sistem dan landasan ideal yang ada dan memecahkan semua permasalahan tersebut. Krisis yang tak kunjung terselesaikan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut. Oleh karena orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis dan berperilaku demokratis, akan mampu mencari alternatif

penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Ia juga mampu mengevaluasi, membedakan dan menentukan apakah suatu informasi buah pikiran orang lain ataupun pikirannya sendiri itu benar atau salah.

Sejalan dengan meningkatnya perubahan yang bersifat multidimensional baik, politik ekonomi maupun sosial budaya, tuntutan pemikiran kritis dan tindakan kreatif serta berperilaku demokratis adalah mutlak diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, seperti diungkapkan Winataputra (2008:8) bahwa :

Paradigma pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada (1) pandangannya yang *pluralistik-uniter* (bermacam-macam, tetapi menyatu dalam pengertian *Bhinneka Tunggal Ika*, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spritual, rasional, emosional, dan sosial), dan (4) konteks (*setting*) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya. Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia.

Dalam konteks ini juga, maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan pendidikan pada umumnya memiliki peran penting karena “mata pelajaran ini secara etimologis pada awalnya dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* antara lain mengembangkan nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan negara hukum” (Al-Muchtar, 2000:19).

Atas dasar permasalahan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sangatlah penting, yakni untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar dan nilai-nilai demokrasi, sehingga dalam diri siswa tumbuh kesadaran berdemokrasi dan berperilaku demokratis yang diperlukan guna menegakkan negara hukum. Pendidikan Kewarganegaraan dengan karakteristik konsepnya yang abstrak, kompleks dan simbolik, diharapkan dapat dijadikan wahana yang potensial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berperilaku demokratis siswa. Mengingat perannya yang demikian strategis, maka diperlukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berkualitas. Melalui pembelajaran ini guru dituntut untuk dapat membimbing siswa berpikir kritis, dan berperilaku demokratis dan menuntut mereka menghubungkan konsep yang diterimanya dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berperilaku demokratis siswa. Hal ini perlu dikembangkan mengingat dengan berpikir setiap individu akan mengalami perkembangan intelektual yang semakin matang. Namun, kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan hal sebaliknya, penguasaan kompetensi siswa pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini salah satunya tercermin dari rendahnya penguasaan kognitif siswa terhadap konsep-konsep Pendidikan Kewarganegaraan.

Apalagi sekarang di era globalisasi dengan didukung oleh perkembangan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu alat transportasi dan komunikasi yang semakin maju mobilisasi sosial secara vertikal dan horizontal bukan hanya

bergaul antar suku, di dalam suatu negara, melainkan lintas bangsa dengan negara-negara lain yang menuntut untuk senantiasa hidup berdampingan antar etnik dan ras dengan latar belakang sosio kultur yang berbeda. Untuk itu perilaku demokratis perlu dibangun dan dilatih sedini mungkin terhadap anak didik.

Menurut Winataputra (2001:28) :

Seluruh warga negara dituntut untuk meningkatkan kedewasaan sehingga mereka mampu berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebutuhan ini dirasakan sangat mendesak, karena hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakmatangan dalam berfikir, bersikap dan bertindak demokratis itu ternyata di alami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses pembelajaran yang demokratis sekarang ini menjadi tuntutan dalam peningkatan kualitas demokratis yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas, ide, partisipasi (komitmen guru) untuk mengembangkan akses jaringan kerja yang lebih luas terhadap pengembangan berpikir kritis siswa. Pembelajaran demokrasi menuntut upaya supaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan pola perilaku demokratis sebagai warga negara, dalam menciptakan tatanan iklim yang demokratis, upaya ini amat strategis yang pada gilirannya kelak secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis. Proses demokratis pada muaranya akan muncul siswa sebagai “Warga Negara muda”(*young citizen*) yang berperilaku demokratis.

Dari pemikiran teoretik dan empirik seperti dipaparkan di atas, maka amat penting dan layak untuk dilakukan suatu studi agar memperoleh gambaran

mengenai proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis di sekolah untuk meningkatkan dan perbaikan yang lebih spesifik terhadap peningkatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan suatu masalah inti dan sekaligus menjadi fokus telaahan dalam penelitian ini sebagai berikut “Seberapa besar pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap perilaku demokratis siswa Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung?”

Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah tersebut di atas, maka penulis batasi masalahnya sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa?
2. Seberapa besar pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa?
3. Seberapa besar perbedaan pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Non Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap perilaku demokratis siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan menggambarkan pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa.
- b. Mengidentifikasi dan menggambarkan pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa.
- c. Mengidentifikasi dan menggambarkan perbedaan pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Non Teknik di Kabupaten Bandung terhadap perilaku demokratis siswa.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data konseptual dan gambaran mengenai alternatif pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dikembangkan guru dalam meningkatkan perilaku demokratis siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

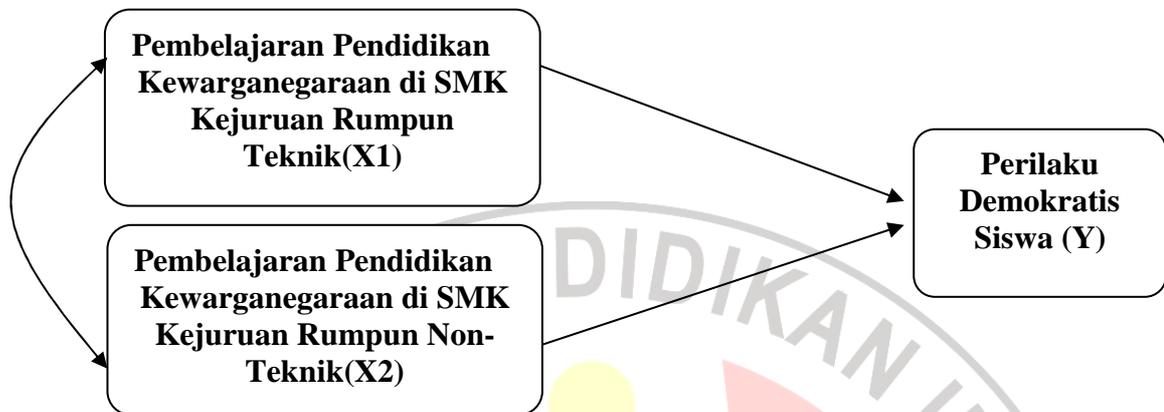
- a. Selain sebagai tugas akhir juga merupakan bahan pengembangan bagi peneliti.
- b. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka mengembangkan dan pembinaan perilaku demokratis siswa sebagai alternatif pengembangan atau kemampuan siswa dalam berpikir kritis, sikap dan keterampilan sosial dalam proses kegiatan belajar di sekolah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan berbagai program di Perguruan Tinggi serta sebagai masukan pada Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu **pertama** adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik (X1), **dua** pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Non Teknik (X2) yang masing-masing meliputi materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan yang menjadi variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah perilaku demokratis siswa.

Sesuai dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pola hubungan antar variabel penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Hubungan Antarvariabel

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Setiap terminologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan dalam lapangan studi yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti, sehingga tidak mengundang tafsir yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional atas penelitian berikut ini:

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam penelitian ini, istilah Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian sebagai *civic education*, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang berkedudukan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diarahkan untuk menghasilkan kompetensi Kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa yang meliputi dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*),

kecakapan Kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak Kewarganegaraan (*civic disposition*).

Adapun indikator Pendidikan Kewarganegaraan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung, dengan definisi operasional sebagai berikut:

1) **Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah**

Kejuruan Rumpun Teknik (X1) adalah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang melibatkan guru sebagai pengajar dan siswa sebagai peserta didik yang di dalamnya dioperasionalisasikan berbagai komponen pembelajaran yang meliputi materi, metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran. Adapun indikator yang akan diukur dari variabel ini seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR
<p>Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK rumpun teknik (Variabel X1)</p> <p>1. Materi Pembelajaran PKn</p>	<p>1. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum</p> <p>2. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir siswa</p> <p>3. Materi pembelajaran diangkat dari realitas kehidupan siswa</p>

VARIABEL	INDIKATOR
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Materi pembelajaran diorganisasikan dari hal konkrit menuju abstrak 5. Materi pembelajaran diorganisasikan dari pengalaman praktis menuju teori 6. Materi pembelajaran diorganisasikan dari lingkungan terdekat siswa, lokal, nasional dan internasional 7. Materi pembelajaran akurat jika ditinjau dari segi keilmuan 8. Materi pembelajaran bersifat aktual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Metode Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian metode dengan materi pembelajaran 2. Variasi metode yang digunakan 3. Metode yang digunakan menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 4. Metode yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
3. Media Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jenis media visual, audio dan audio visual 2. Kesesuaian media dengan tujuan dan materi pembelajaran 3. Keberfungsian media
4. Sumber Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk sumber pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Materi bacaan 2) Materi bukan bacaan, masyarakat, dan lingkungan 2. Jenis sumber pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sengaja direncanakan 2) Sengaja dimanfaatkan

VARIABEL	INDIKATOR
5. Evaluasi Pembelajaran PKn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses belajar dan hasil belajar 2. Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor 3. Penilaian oleh guru, siswa sendiri (<i>self evaluation</i>), dan siswa lain. 4. Bentuk penilaian tertulis (<i>pencil and paper test</i>) dan berdasarkan perbuatan (<i>performance based assessment</i>), penugasan (<i>project</i>), produk (<i>product</i>), atau portofolio. 5. Tindak lanjut hasil penilaian

- 2) **Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Non Teknik (X2)** adalah proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang melibatkan guru sebagai pengajar dan siswa sebagai peserta didik yang didalamnya dioprasionalisasikan berbagai komponen pembelajaran yang meliputi materi, metoda, media, sumber dan evaluasi pembelajaran.

Adapun indikator yang akan diukur dari variabel ini seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR
<p>Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK rumpun non teknik (Variabel X2)</p> <p>1. Materi Pembelajaran PKn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum 2. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir siswa 3. Materi pembelajaran diangkat dari realitas kehidupan siswa 4. Materi pembelajaran diorganisasikan dari hal konkrit menuju abstrak 5. Materi pembelajaran diorganisasikan dari pengalaman praktis menuju teori 6. Materi pembelajaran diorganisasikan dari lingkungan terdekat siswa, lokal, nasional dan internasional 7. Materi pembelajaran akurat jika ditinjau dari segi keilmuan 8. Materi pembelajaran bersifat aktual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
<p>2. Metode Pembelajaran PKn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian metode dengan materi pembelajaran 2. Variasi metode yang digunakan 3. Metode yang digunakan menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran

VARIABEL	INDIKATOR
	4. Metode yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
3. Media Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jenis media visual, audio dan audio visual 2. Kesesuaian media dengan tujuan dan materi pembelajaran 3. Keberfungsian media
4. Sumber Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk sumber pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Materi bacaan b. Materi bukan bacaan, masyarakat, dan lingkungan 2. Jenis sumber pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Sengaja direncanakan b. Sengaja dimanfaatkan
5. Evaluasi Pembelajaran Pkn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses belajar dan hasil belajar 2. Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor 3. Penilaian oleh guru, siswa sendiri (<i>self evaluation</i>), dan siswa lain. 4. Bentuk penilaian tertulis (<i>pencil and paper test</i>) dan berdasarkan perbuatan (<i>performance based assessment</i>), penugasan (<i>project</i>), produk (<i>product</i>), atau portofolio. 5. Tindak lanjut hasil penilaian

- b. **Perilaku Demokratis** adalah perilaku warga negara yang sifatnya individual dan erat kaitannya dengan kepribadian, yang terbentuk sepanjang ia hidup melalui proses sosialisasi, yang mengandung sifat sosial, serba terbuka untuk orang lain, untuk saling memberi dan menerima serta saling menghargai dan lebih mengedepankan unsur normatif dari pada unsur pribadi. Dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, Untuk lebih jelasnya, indikator-indikator variabel perilaku demokratis siswa (Y) ini seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR
<p>Perilaku Demokratis Siswa (Variabel Y)</p> <p>1. <i>Pro bona publico</i>, yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan</p> <p>2. <i>Pro patricia primus patrialis</i>, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk negara atau kepentingan umum</p>	<p>1. Bergotong royong</p> <p>2. Mematuhi tata tertib lalu lintas</p> <p>3. Tidak membuang sampah sembarangan</p> <p>4. Menjaga kekayaan sekolah</p> <p>5. Memilih pemimpin atas dasar pertimbangan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan</p> <p>6. Menjaga harta milik publik seperti telepon umum, ATM</p> <p>7. Menjaga sumber-sumber kekayaan alam seperti mata air, cagar alam dan lain-lain</p> <p>1. Membayar pajak, iuran sekolah secara berdisiplin</p> <p>2. Menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan pemimpin</p> <p>3. Menjaga berbagai simbol kenegaraan seperti Bendera Merah Putih, Lambang Negara, Lagu Indonesia Raya, Foto resmi Presiden dan wakil Presiden</p> <p>4. Bersedia menjadi relawan sosial bila diperlukan</p> <p>5. Bersedia menjadi relawan bila diperlukan</p>

VARIABEL	INDIKATOR
<p>3. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia mendengarkan pendapat orang lain 2. Tidak membenci orang lain yang berbeda pendirian 3. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan diri sendiri 4. Menghormati orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
<p>4. Terbuka menerima pendapat orang lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan orang lain yang sedang berbicara 2. Suka meminta pendapat orang lain 3. Mempertimbangkan pendapat orang lain yang lebih baik 4. Bersedia menerima pendapat yang dinilai lebih baik
<p>5. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui pandangan sendiri yang ternyata keliru 2. Memberikan pendapat secara lisan dan atau tulisan 3. Bersedia memberikan pendapat secara tulus 4. Memberikan pendapat dengan menggunakan tatakrama dan santun bahasa yang baik 5. Selalu menopang pendapatnya dengan alasan atau argumen yang kuat
<p>6. Bersikap kritis terhadap pendapat orang lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap cermat dalam informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain 2. Mendengarkan pendapat orang lain 3. Bersedia menggali alasan di balik pendapat orang lain yang dikemukakan

VARIABEL	INDIKATOR
<p>7. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan</p>	<p>4. Bersedia mencari alasan lain yang lebih tepat dari pendapat orang lain</p> <p>5. Menyanggah pendapat orang lain dengan pandangan diri sendiri yang didukung argumen yang kuat</p> <p>1. Memilih persoalan dengan cermat</p> <p>2. Mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah</p> <p>3. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang mendukung</p> <p>4. Memilih alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan layak</p> <p>5. Bersifat antisipatif terhadap keputusan pemecahan masalah yang diambil</p>
<p>8. Menghormati hak orang lain</p>	<p>1. Tidak mengambil hak orang lain dengan cara apapun</p> <p>2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan haknya dengan baik</p> <p>3. Selalu menjaga agar tidak mengganggu orang lain</p> <p>4. Tidak mencemoohkan orang lain karena berbeda bahasa dan budaya</p>
<p>9. Menghormati kekuasaan yang sah</p>	<p>1. Menjalankan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai siswa</p> <p>2. Menghormati pemerintah pusat, daerah, dan tokoh panutan dalam masyarakat</p> <p>3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam lingkungan sendiri, seperti sekolah dan masyarakat</p>

VARIABEL	INDIKATOR
<p>10. Bersikap adil dan tidak diskriminatif</p>	<p>4. Turut serta memantau pelaksanaan kebijakan publik</p> <p>5. Memperlakukan orang lain sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam lingkungannya</p> <p>1. Tidak bersifat kesukuan atau kedaerahan</p> <p>2. Tidak fanatik terhadap golongannya</p> <p>3. Menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri</p> <p>4. Menerapkan prinsip meritokratif yakni pemberian imbalan sesuai dengan prestasi kerja dalam berbagai keuntungan</p>
<p>11. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab</p>	<p>1. Selalu menyampaikan amanat yang diperoleh kepada yang berhak</p> <p>2. Bersedia mengganti sesuatu amanat yang hilang atau cacat karena kecerobohan sendiri</p> <p>3. Melaksanakan tugas yang diberikan guru, Kepala Sekolah dengan baik</p> <p>4. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan cara terbaik yang bisa dilakukan</p> <p>5. Berorientasi pada pencapaian hasil yang terbaik dalam memenuhi tugas</p>

F. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang memiliki tingkat kesadaran berperilaku demokratis yang tinggi.

Bertolak dari asumsi tersebut dan mengacu kepada pertanyaan penelitian, maka dapat dikemukakan sebuah hipotesis penelitian secara umum sebagai berikut: Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh signifikan dan terdapat perbedaan terhadap perilaku demokratis siswa Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung.

Untuk lebih spesifik dan jelasnya, hipotesis tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa hipotesis *minor* yang lebih khusus atau rinci, sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik berpengaruh positif terhadap perilaku demokratis siswa.
2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Non Teknik berpengaruh positif terhadap perilaku demokratis siswa.
3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku demokratis siswa.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut jenis pendekatan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang ada pada masa sekarang (Dahlan, 1982:92; Nazir, 1988:63; Surahmad, 1990:140). Metode deskriptif-analisis dalam penelitian dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2001:14).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama menggunakan teknik kuesioner dengan instrumen angket dan didukung dengan teknik studi literatur dan studi dokumentasi. Seluruh variabel penelitian yaitu **pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik (X1), pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Kejuruan Rumpun Non Teknik (X2), dan Perilaku Demokratis Siswa (Y)** menggunakan angket skala SSHA (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman. Pola skala SSHA Brown dan Holtzman ini menggunakan empat option, yaitu (1) Selalu, (2) Sering, (3) Pernah, dan (4) Tidak Pernah. Jawaban yang tepat diberi bobot/skor empat, sedangkan yang tidak tepat sekali diberi

bobot/skor 3,2, dan 1. Keunggulan skala model ini tidak mengukur aspek kemampuan seseorang untuk menjawab, sebab yang dituntut dalam skala ini bukan bagaimana seharusnya ia menjawab soal ini dengan benar berdasarkan pengetahuannya, tetapi bagaimana kebiasaan mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

Sebelum menggunakan instrumen tersebut sebagai alat pengumpul data, terlebih dahulu diuji dengan menggunakan:

1. Uji validitas menggunakan rumus korelasi *Pearson product moment* (Uji r) dan *Spearman Brown* (Uji t)
2. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian dalam bentuk visualisasi berupa bagan atau tabel prosentase dari jawaban responden terhadap indikator permasalahan. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi.

4. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, disusun prosedur penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan pengembangan teori yang mencakup teori-teori tentang Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi-kompetensi kewarganegaraan (pengetahuan, watak, dan keterampilan kewarganegaraan) dan teori perilaku demokratis.
- b. Penyusunan instrumen pengumpulan data sesuai dengan variabel yang telah dirumuskan serta landasan dan kerangka teoretik.
- c. Pemilihan unit analisis penelitian, yaitu sejumlah SMK Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung baik negeri maupun swasta, dilanjutkan dengan pemilihan subjek atau responden penelitian yaitu siswa SMK Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik tersebut secara acak.
- d. Pengumpulan data melalui kuesioner.
- e. Pengolahan data dengan cara melakukan verifikasi, pengolahan data statistik, analisis, dan interpretasi hasil penelitian.
- f. Perumusan temuan penelitian dan perumusan kesimpulan hasil penelitian.

5. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung. Pemilihan sampel penelitian dilakukan melalui dua cara.

Pertama, pengambilan sampel SMK Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik, dengan teknik *cluster* dan acak, yaitu secara *cluster* mengklasifikasikan seluruh SMK di Kabupaten Bandung menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama adalah SMK Rumpun Teknik, kategori kedua SMK Rumpun Non Teknik. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bandung jumlah SMK Rumpun Teknik ada 23 sekolah dan SMK Rumpun Non Teknik ada 19 sekolah, jumlah keseluruhan adalah 42 Sekolah. Adapun jumlah sekolah yang dijadikan sampel adalah enam SMK yang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok SMK Rumpun Teknik terdiri atas tiga sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Katapang, SMKN 7 Baleendah, SMKS Angkasa 1 Margahayu dan kelompok SMK Rumpun Non Teknik terdiri atas tiga sekolah yaitu SMK Negeri 3 Baleendah, SMKS Pasundan 1 Banjaran dan SMKS Angkasa 2 Margahayu.

Kedua, memilih sampel responden siswa dari tiap sekolah terpilih, dengan teknik *proportional stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampel siswa dari anggota populasi (seluruh siswa SMK Rumpun Teknik dan Rumpun Non Teknik yang ada di Kabupaten Bandung) secara acak dan berstrata secara *proporsional*. Hal ini dilakukan karena kondisi populasi penelitian ini terdiri dari

beberapa kelompok individu dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu siswa kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Adapun pemilihan siswa yang dijadikan sampel dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak (*random numbers*) dari Rand (Wahyudin, 2007) Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, jumlah siswa SMK Rumpun Teknik, dan Rumpun Non Teknik adalah 16.169 orang. Dari jumlah populasi tersebut dapat dihitung jumlah minimal sampel penelitian dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane (Rahmat, 1998:82). Jadi jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 100 orang siswa.

Adapun sebaran sampel berdasarkan sekolah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Sebaran Sampel Penelitian

No	Nama Sekolah	Jumlah Sampel
1.	SMKN 1 Katapang	40
2.	SMKN 7 Baleendah	40
3.	SMKS Angkasa1 Margahayu	40
4.	SMKN 3 Baleendah	40
5.	SMKS Pasundan1 Banjaran	40
6.	SMKS Angkasa 2 Margahayu	40
	Jumlah	240

Berdasarkan tabel di atas sebaran sampel pada setiap SMK terdiri atas tiga SMK Rumpun Teknik dan tiga SMK Rumpun Non Teknik di Kabupaten Bandung dengan jumlah responden seluruhnya 240 siswa.